

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2011-2013
(Studi Empiris Kabupaten / Kota seluruh Provinsi Jawa Tengah)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

YUDANTORO ADI NUGROHO
B200100303

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:
“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2011-2013
(Studi Empiris Kabupaten / Kota seluruh Provinsi Jawa Tengah)”.

Yang ditulis oleh:

YUDANTORO ADI NUGROHO

B 200100303

Penandatangan berpendapat bahwa Usulan Penelitian tersebut telah memenuhi
syarat untuk diterima.

Surakarta, Desember 2014

Pembimbing

(Dr. Erma Setiawati, Ak, M.M)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, M.Si)

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2011-2013
(Studi Empiris Kabupaten / Kota seluruh Provinsi Jawa Tengah)**

YUDANTORO ADI NUGROHO

(B200100303)

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: ace.erde@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2011-2013.

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *teknik sampling jenuh* dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini sejumlah 105 Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota, APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian 2011-2013. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah belanja modal, pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU). Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis regresi linear berganda.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengalokasi Anggaran Belanja Modal.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maryati dan Endarwati, 2010)

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Oktora dan Pontoh, 2013)

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Indarti dan Sugiartina 2012). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004) dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006) dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Sedangkan menurut Nanga (2001:279) dalam (Indarti dan Sugiato, 2012). pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Boediono, 2009 : 1) dalam (Rizani, dkk, 2011).

Tabel 1.1 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah pada tahun 2011- 2013.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2011- 2013

No	KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI		
		2011	2012	2013
1	KAB. CILACAP	13,80	11,14	12,40
2	KAB. BANYUMAS	9,85	12,46	11,50
3	KAB. PURBALINGGA	13,02	11,91	11,76
4	KAB. BANJARNEGARA	11,10	10,26	11,72
5	KAB. KEBUMEN	9,84	10,98	11,77
6	KAB. PURWOREJO	10,46	10,19	10,96
7	KAB. WONOSOBO	10,08	10,66	11,36
8	KAB. MAGELANG	9,33	11,01	11,07
9	KAB. BOYOLALI	11,44	10,51	11,95
10	KAB. KLATEN	8,11	11,04	12,46
11	KAB. SUKOHARJO	11,17	11,29	12,22

No	KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI		
		2011	2012	2013
12	KAB. WONOGIRI	6,76	10,50	10,97
13	KAB. KARANGANYAR	11,53	11,46	12,12
14	KAB. SRAGEN	13,21	12,96	13,11
15	KAB. GROBOGAN	9,88	12,66	11,05
16	KAB. BLORA	8,30	9,58	12,61
17	KAB. REMBANG	9,47	9,41	10,55
18	KAB. PATI	11,41	10,31	11,68
19	KAB. KUDUS	7,57	9,19	11,45
20	KAB. JEPARA	10,98	10,85	11,59
21	KAB. DEMAK	9,85	9,99	10,91
22	KAB. SEMARANG	11,42	12,24	13,75
23	KAB. TEMANGGUNG	10,55	10,61	11,58
24	KAB. KENDAL	12,54	10,73	11,11
25	KAB. BATANG	11,32	10,70	11,21
26	KAB. PEKALONGAN	11,10	11,22	12,09
27	KAB. PEMALANG	11,28	10,29	11,80
28	KAB. TEGAL	10,87	11,41	12,11
29	KAB. BREBES	12,28	9,74	12,05
30	KOTA MAGELANG	10,34	12,53	11,37
31	KOTA SURAKARTA	10,58	10,80	11,65
32	KOTA SALATIGA	9,73	10,36	1,91
33	KOTA SEMARANG	11,67	12,22	12,33
34	KOTA PEKALONGAN	10,18	10,61	12,19
35	KOTA TEGAL	8,03	8,25	10,28

Sumber data : BPS Propinsi Jawa Tengah

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pendapatan asli daerah setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah dalam (Rizani, dkk, 2011).

Menurut Halim (2004 : 67) dalam (Arwati dan Hadiati, 2013) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Dearah yang sah (Arwati dan Hadiati, 2013).

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah pada tahun 2011- 2013.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2011- 2013

No	KABUPATEN/KOTA	PAD		
		2011	2012	2013
1	KAB. CILACAP	160.777,1	150.456,5	191.852,6
2	KAB. BANYUMAS	172.487,7	188.589,7	229.194,4
3	KAB. PURBALINGGA	91.721,64	91.191,27	101.375,8
4	KAB. BANJARNEGARA	60.278,75	63.548,92	76.518,41
5	KAB. KEBUMEN	68.320,52	79.175,98	104.721,6
6	KAB. PURWOREJO	67.353,77	77.073,81	109.488
7	KAB. WONOSOBO	60.314,88	55.401,34	72.795,29
8	KAB. MAGELANG	88.180,51	95.290,1	124.151,9
9	KAB. BOYOLALI	81.390,5	108.796,1	142.676,5
10	KAB. KLATEN	65.498,45	75.874,33	82.921,36
11	KAB. SUKOHARJO	71.051,62	124.642,7	154.067,8

No	KABUPATEN/KOTA	PAD		
		2011	2012	2013
12	KAB. WONOGIRI	62.183,76	75.187,26	87.845,02
13	KAB. KARANGANYAR	82.577,78	89.499,16	121.180,2
14	KAB. SRAGEN	82.381,07	89.875,45	105.574,1
15	KAB. GROBOGAN	67.718,52	84.755,39	101.116,6
16	KAB. BLORA	58.400	61.400	77.000
17	KAB. REMBANG	80.130,64	89.947,7	110.867,3
18	KAB. PATI	10.7985,7	131.187,7	134.961,8
19	KAB. KUDUS	10.0621,2	113.622,3	138.912
20	KAB. JEPARA	97.874,43	103.717	110.488,9
21	KAB. DEMAK	67.751,26	78.032,02	100.414,8
22	KAB. SEMARANG	134.484,6	129.934,9	166.505,5
23	KAB. TEMANGGUNG	58.339,49	66.428,52	84.225,72
24	KAB. KENDAL	85.677,12	87.150,66	107.394,7
25	KAB. BATANG	53.431,31	56.175,22	83.242,37
26	KAB. PEKALONGAN	76.011,23	86.764,83	127.126
27	KAB. PEMALANG	71.725,74	77.349,38	92.422
28	KAB. TEGAL	83.974,51	84.974,47	124.014
29	KAB. BREBES	86.210	89.517,32	107.109,4
30	KOTA MAGELANG	55.022,6	63.085,39	79.889,92
31	KOTA SURAKARTA	159.164,8	189.736,9	262.905,9
32	KOTA SALATIGA	62.498,99	63.280,94	67.830,27
33	KOTA SEMARANG	427.311,7	660.372,4	714.026,9
34	KOTA PEKALONGAN	53.122,17	59.819,11	79.069,12
35	KOTA TEGAL	94.465,11	117.210,5	148.201,5

Sumber data : DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

Dana Alokasi Umum. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil (Indarti dan Sugiartiana. 2012)

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana hibah (*grants*) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima (Arwati dan Hadiati, 2013).

Tabel I.3

Dana Alokasi Umum

Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2011- 2013

No	KABUPATEN/KOTA	DAU		
		2011	2012	2013
1	KAB. CILACAP	877.475,5	1.057.808	1.197.315
2	KAB. BANYUMAS	835.991,3	991.945	1.127.939
3	KAB. PURBALINGGA	522.204,3	640.265,5	719.185
4	KAB. BANJARNEGARA	562.584,6	681.395,9	763.426,6
5	KAB. KEBUMEN	732.339,1	906.222	1.021.871
6	KAB. PURWOREJO	586.119,4	711.741,8	793.904,7
7	KAB. WONOSOBO	486.041,1	597.858,5	665.548
8	KAB. MAGELANG	669.259,4	816.732,6	899.528,4
9	KAB. BOYOLALI	641.787,7	780.301,9	871.686
10	KAB. KLATEN	792.938,5	967.284,8	1.066.318
11	KAB. SUKOHARJO	565.131,7	680.235	763.462,9
12	KAB. WONOGIRI	682.359,3	828.479,5	917.476,6

No	KABUPATEN/KOTA	DAU		
		2011	2012	2013
13	KAB. KARANGANYAR	577.830,1	720.918,5	810.216,6
14	KAB. SRAGEN	618.724,3	778.668	869.155,5
15	KAB. GROBOGAN	669.380,1	812.990,7	906.666,4
16	KAB. BLORA	547.438	673.180,5	753.830
17	KAB. REMBANG	468.987,9	570.454,9	640.273,4
18	KAB. PATI	692.522,9	850.377,2	960.479,3
19	KAB. KUDUS	489.096,7	637.615,4	719.406,9
20	KAB. JEPARA	592.496,1	712.740,5	814.380,3
21	KAB. DEMAK	544.790,1	658.971,3	737.911,6
22	KAB. SEMARANG	568.138,1	691.271,6	778.604,9
23	KAB. TEMANGGUNG	483.204	584.158,3	651.171,7
24	KAB. KENDAL	569.535,4	702.708,1	788.134,1
25	KAB. BATANG	472.388,3	577.238	641.663,6
26	KAB. PEKALONGAN	553.949	678.713,9	768.500,1
27	KAB. PEMALANG	672.819,6	827.163,2	931.427
28	KAB. TEGAL	704.172,5	860.568,4	957.576,3
29	KAB. BREBES	800.671,7	981.051,2	1.099.000
30	KOTA MAGELANG	292.758,6	348.498,2	385.859,2
31	KOTA SURAKARTA	545.289,8	681.813,5	659.647,4
32	KOTA SALATIGA	262.810,3	325.710	358.331,9
33	KOTA SEMARANG	715.960	936.865,9	1.054.003
34	KOTA PEKALONGAN	293.728	347.390,4	384.489,4
35	KOTA TEGAL	265.641,5	334.819,1	370.643

Sumber data : DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

Anggaran Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya (Nordiawan, 2006: 50) dalam (Indarti dan Sugiartiana, 2012). Berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (SAP, 2005:94) dalam (Indarti dan Sugiartiana, 2102). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli (Indarti dan Sugiartiana, 2012).

Tabel I.4

Belanja Modal

Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2011-2013

No	KABUPATEN/KOTA	Belanja Modal		
		2011	2012	2013
1	KAB. CILACAP	199.536,1	336.135	324.565,4
2	KAB. BANYUMAS	254.640,1	267.277,9	409.457,1
3	KAB. PURBALINGGA	82.050,86	126.405,4	125.910,4
4	KAB. BANJARNEGARA	151.462,6	172.880,2	163.097,2
5	KAB. KEBUMEN	145.573,7	220.424	254.695,5
6	KAB. PURWOREJO	105.264,7	171.088,2	164.192,1
7	KAB. WONOSOBO	139.178,3	211.557,7	222.816,4
8	KAB. MAGELANG	155.334,9	261.239,4	279.926,2
9	KAB. BOYOLALI	141.318,3	182.775,5	248.858,9
10	KAB. KLATEN	155.758,7	183.942,3	181.802,7
11	KAB. SUKOHARJO	88.587,62	193.153,6	202.558,6
12	KAB. WONOGIRI	138.829,9	204.300,2	196.668,7

No	KABUPATEN/KOTA	Belanja Modal		
		2011	2012	2013
13	KAB. KARANGANYAR	70.949,73	105.905,2	126.882,5
14	KAB. SRAGEN	98.845,17	166.719,7	102.838
15	KAB. GROBOGAN	184.927,1	259.826,1	383.645,1
16	KAB. BLORA	204.602,3	263.637,8	277.566
17	KAB. REMBANG	157.302,3	197.513,6	184.417,7
18	KAB. PATI	128.347,2	179.057,8	253.211,4
19	KAB. KUDUS	162.858,4	197.248,8	149.339,6
20	KAB. JEPARA	191.515,5	212.172,8	186.955,7
21	KAB. DEMAK	200.546	314.747,4	295.427,4
22	KAB. SEMARANG	129.986,3	227.370,2	245.412,9
23	KAB. TEMANGGUNG	73.070,09	94.993,66	204.630,1
24	KAB. KENDAL	181.778	224.223,5	245.668,9
25	KAB. BATANG	72.568,4	134.437,9	158.486,5
26	KAB. PEKALONGAN	96.333,23	160.582,9	201.327,2
27	KAB. PEMALANG	95.000,08	205.884	288.004,5
28	KAB. TEGAL	175.031,6	287.340,2	222.910,1
29	KAB. BREBES	234.397,1	284.054,7	403.345
30	KOTA MAGELANG	66.479,09	123.517	122.368,2
31	KOTA SURAKARTA	245.922	196.087,2	264.918,1
32	KOTA SALATIGA	86.935,2	150.127,4	163.571,3
33	KOTA SEMARANG	338.248,7	424.037,1	719.171,1
34	KOTA PEKALONGAN	75.889,49	104.502,8	118.778,3
35	KOTA TEGAL	97.060,78	86.187,97	116.630,8

Sumber data : DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

Hasil Penelitian Mawarni, dkk (2013) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh) menyatakan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Hasil Penelitian Maryati dan Endrawati (2010) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat menyatakan bahwa hasil analisis membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan OAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan menyatakan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di pulau Kalimantan sedangkan pengujian secara parsial dana alokasi umum dan dana pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di pulau Kalimantan. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di pulau Kalimantan.

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) kota/ kabupaten di provinsi Jawa Tengah berupa data kuantitatif, yaitu Data Laporan Realisasi Anggaran APBD pemerintah kota/ kabupaten di provinsi Jawa Tengah mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD seluruh kota/

kabupaten di provinsi Jawa tengah pada tahun 2011-2013. Berdasarkan kriteria yang dipakai sebagai sampel adalah Kota/ kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD secara konsisten dari tahun 2011-2013. Data dikumpulkan dari pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) kota/ kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada periode 2011-2013.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Namun sebelum melakukan regresi berganda terlebih dahulu dilakukan beberapa uji, yaitu:

a) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonearitas dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF), jika terdapat gejala multikolonearitas maka nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF >10 (Indarti dan Sugiartiana, 2012)

2) Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) (Indarti dan Sugiartiana, 2012)

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka ada problem autokorelasi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, yaitu dengan Uji Durbin-Waston (DW test) ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen (Indarti dan Sugiartiana, 2012).

4) Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual/pengganggu mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik, dengan melihat histogram dan uji statistik dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Indarti dan Sugiartiana, 2012).

b) Uji Hipotesis

1) Uji Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu metode persamaan linier berganda atas tiga variabel bebas melalui uji “F” (Uji secara simultan) dan uji “t” (Uji secara individual)

dengan tingkat signifikan pengujian sebesar 5% dan uji koefisien determinasi (R^2).

Model persamaan regresi berganda:

$$PA = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 AU + e$$

Keterangan:

PA = Pengalokasian Anggaran

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

AU = Alokasi Umum

e = *error term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik deskripsi diketahui bahwa untuk pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 10.9504, nilai maximum sebesar 13,80, nilai minimum sebesar 1,91 dan nilai standar deviasiasi sebesar 1,53535. Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 113119,9232, nilai maximum sebesar 714026,93, nilai minimum sebesar 53122,17 dan nilai standar deviasiasi sebesar 94617,18458. Dana Alokasi Umum diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 696759,5669, nilai maximum sebesar 1197315,06, nilai minimum sebesar 262810,28 dan nilai standar deviasiasi sebesar 2,02670. Belanja Modal diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 194928,9518, nilai maximum sebesar 719171,07, nilai minimum sebesar 66479,09 dan nilai standar deviasiasi sebesar 93538,16625.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), adapun hasil sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov (K-S)	Sig.	Keterangan
0,471	0,979	Normal

Sumber data : data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan table diketahui bahwa nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0,471 dan nilai sig. sebesar 0,979, maka dengan demikian hasil tersebut dinyatakan berdistribusi normal hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih besar 0,05.

Uji Multikolinearitas

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai toleran dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF), jika terdapat gejala multikolinearitas maka nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$, adapun hasil analisis dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	0,811	1,233	Tidak terjadi multikolinearitas
Pendapatan Asli Daerah	0,728	1,373	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	0,748	1,336	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber data : data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar ($>0,10$) atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari (<10) maka dapat dikatakan data tersebut tidak terjadi adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana varians (dalam hal ini varians residual) tidak stabil (konstan). Heteroskedastisitas dapat pula terjadi bilamana efek variabel independen terhadap variabel dependen berbeda pada dua kelompok sampel yang berbeda. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	0,527	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pendapatan Asli Daerah	0,053	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,811	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber data : data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan hasil tabel diketahui bahwa dengan uji *glejser* yang dilakukan dengan cara mengabsolutkan nilai residual, kemudian hasil absolute residual diregresikan dengan variabel independen, apabila signifikan diperoleh lebih dari 0,05, maka dengan demikian hasil dari masing-masing variabel dinyatakan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Durbin-Watson (DW test), adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW-hitung	Kriteria	Keputusan
1,746	$1,589 < 1,803 < 1,726$	Tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif

Sumber data : data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan tabel tersebut dengan menggunakan derajat kesalahan (α) =5%, dengan prediktor sebanyak 2 maka batas atas (U) adalah sebesar 1,589 sedang batas bawah (L) adalah sebesar 1,726 Karena nilai DW hasil regresi adalah sebesar 1,803 yang berarti lebih besar dari nilai batas bawah, maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil regresi tersebut terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikan 0,05, analisis ini digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	T	Sig
Konstanta	1,714	1,162		
Pertumbuhan Ekonomi	0,057	0,027	2,146	0,035
Pendapatan Asli Daerah	0,383	0,068	5,669	0,000
Dana Alokasi Umum	0,748	0,089	7,655	0,000
Rsquare = 0,638			Fhitung = 51,793	
Adjusted Rsquare = 0,626			Sig = 0,000	

Sumber data : data sekunder diolah, 2014

$$BM = 1,714 + 0,057(PE) + 0,383(PAD) + 0,742(DAU)$$

Interpretasinya:

- 1) Konstanta sebesar 1,714 yang artinya apabila Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum maka belanja modal akan meningkat.
- 2) Koefisien Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,057 dengan tanda positif yang berarti jika variabel Pertumbuhan Ekonomi meningkat, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan.
- 3) Koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,383 dengan tanda positif yang artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan.
- 4) Koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0,748 dengan tanda positif yang artinya jika variabel Dana Alokasi Umum meningkat, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap variabel belanja modal. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel

Hasil Uji F

Fhitung	Ftabel	Sig	Keterangan
51,793	3,15	0,000	Ho ditolak

Berdasarkan hasil tersebut diatas diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 51,793 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,15, dan didukung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap variabel belanja modal

Uji Signifikansi Paramter Individual (Uji t)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, adapun variabel bebas meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama dan variabel terikat adalah belanja modal, hasilnya ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel

Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	sig	t_{tabel}	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	2,146	0,035	2,000	H1 diterima
Pendapatan Asli Daerah	5,669	0,000	2,000	H2 diterima
Dana Alokasi Umum	7,655	0,000	2,000	H3 diterima

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara terhadap belanja modal.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi diketahui nilai t_{hitung} (2,146) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi

$0,035 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel Pendapatan Asli Daerah diketahui nilai t_{hitung} (5,669) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_2 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel Dana Alokasi Umum diketahui nilai t_{hitung} (7,655) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 diterima, artinya Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasilnya dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
.799 ^a	.638	.626

Berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,626. Hal ini berarti bahwa 62,6% variasi variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sedangkan sisanya yaitu 37,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Pertumbuhan Ekonomi signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi diketahui nilai signifikansi (0,035) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ($\text{sig} < 0,05$) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pertumbuhan ekonomi yang diproduksi dengan PDRB perkapita memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Dalam penelitian ini yang dilakukan pada Kabupaten / Kota seluruh provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010:9). dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Mayasari, dkk 2014).

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diproduksi dengan PDRB perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil berbeda tersebut disebabkan oleh perbedaan sampel penelitian, variabel dependen yang digunakan, data periode pengamatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayasari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara statistik berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal

Variabel Pendapatan Asli Daerah diketahui nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ($\text{sig} < 0,05$) maka H_2 diterima dan H_0 ditolak artinya Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Dalam penelitian ini yang dilakukan pada Kabupaten / Kota seluruh provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002) dalam (Arwati dan Hadiati, 2013).

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dini dan Novita Hadiati (2013) yang menyatakan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitiannya Ida dan Rusmanto (2013), hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Variabel Dana Alokasi Umum diketahui nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ($\text{sig} < 0,05$) maka H_3 diterima dan H_0 ditolak artinya Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Dalam penelitian ini yang dilakukan pada Kabupaten / Kota seluruh provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah, semakin banyak DAU yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum lah mandiri, begitu juga sebaliknya.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ida dan Rusmanto (2013), yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh positif yang signifikan pada belanja modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitiannya Fahi et al (2011), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan positif dengan belanja modal.

SIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Penelitian pada model regresi, variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) mempunyai nilai signifikansi t sebesar 0,035 probabilitasnya lebih dari 0,05 ($p > 0,05$) maka **H1 diterima**. Artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013.

Hasil Penelitian pada model regresi, variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai signifikansi t sebesar 0,000 atau probabilitasnya kurang dari 0,05 ($p < 0,05$) maka **H2 diterima**, hal tersebut berarti bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013.

Hasil pengujian variabel Dana Alokasi Umum pada model regresi mempunyai nilai 0,000 atau probabilitasnya kurang dari 0,05 ($p < 0,05$) maka **H3 diterima**, artinya variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati dan Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Terapan 2013*.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007-2009. *Fokus Ekonomi* Vol.7 No. 2 Desember 2012 : 1 –15.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. 2012. *Teori Organisasi*. Yogyakarta : BPFE
- Indarti dan Sugiartana. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang Periode 2005-2009. *Fokus Ekonomi Volume 7 No. 2: 1-15*.
- Indarti, Iin dan Sugiartiana. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
- Maryati dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *ISSN 1858-3687 Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.2 : 68-84*
- Mawarni, dkk. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal, Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi. ISSN 2302-0164. Vol.2, No.2, Mei. pp. 19 – 27*.
- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi Vol.5 No.2 Desember : Hal. 91-102*.

Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013.” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan”, *Jurnal Infestasi*, Vol. 9 No. 2, 91-102.

Oktora dan Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL ACCOUNTABILITY Vol. 2 No. 1.*

Putro, Suratno Nugroho. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Universitas Esa Unggul: Jakarta

Rizani, dkk. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JEPMA Vol.10, No. 1 April hal. 19 – 27.*

Sukirno, Sadono. 2010. Ekonomi Pembangunan: *Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana

www.djpk.depkeu.go.id

www.bps.go.id